

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA
PENYERAPAN ANGGARAN PADA PROGRAM LAYANAN
LELANG SESUAI KEWENANGAN KPKNLDI KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
KOTA PALEMBANG
TAHUN 2017**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

**NYAYU MASHITO AGUSTRIDAYANTI
07011381419176**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
DESEMBER 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA
PENYERAPAN ANGGARAN PADA PROGRAM LAYANAN
LELANG SESUAI KEWENANGAN KPKNL DI KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA
PALEMBANG TAHUN 2017**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

NYAYU MASHITO AGUSTRIDAYANTI

07011381419176

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing,

November 2018

Pembimbing I

Dr.Ardiyan Saptawan,M.Si

NIP.196511171990031004



Pembimbing II

Dra.Martina,M.Si

NIP.19660305199022001



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Pada Program Layanan Lelang Sesuai Kewenangan KPKNL di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palembang Tahun 2017*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 4 Desember 2018.

Palembang, 4 Desember 2018

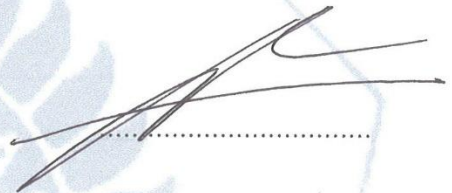
Ketua

1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004



Anggota

1. Dra Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001
2. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001
3. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Zailani Surya Marpaung, S.SOS., MPA
NIP. 198108272009121002



ABSTRAK

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran pada layanan lelang sesuai kewenangan KPKNL di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang Tahun 2017 dalam penyerapan anggaran dikantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang tahun 2017 terjadi ketidak efektifan baik dimensi dokumen perencanaan, dimensi prosedur pembayaran, dimensi prosedur barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif, sumber data adalah data sekunder dan data primer, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor – faktor penyebab terjadinya rendahnya penyerapan anggaran pada Layanan Lelang sesuai Kewenangan KPKNL di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang Tahun 2017 adalah ketidaksesuaian rencana dengan realisasi anggaran dan terbatasnya Sumber daya manusia (SDM) sehingga terjadinya rangkap jabatan dalam perencanaan. Secara garis besar hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyerapan anggaran pada layanan lelang sesuai kewenangan KPKNL di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang palembang tahun 2017 tergolong belum efektif dan diperlukan konsistensi dalam mengimplementasi rencana anggaran.

Kata kunci : penyerapan anggaran , dokumen perencanaan anggaran , prosedur pembayaran , prosedur barang dan jasa.

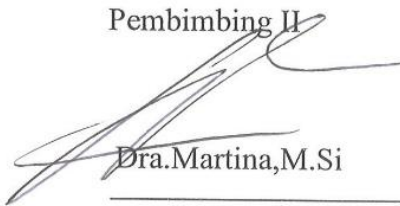
Pembimbing I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si

NIP.196511171990031004

Pembimbing II



Dra. Martina, M.Si

NIP.19660305199022001

Palembang, Desember 2018

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, Msi

NIP.198108270091210

ABSTRACT

The research aimed to find out the factors that caused the low absorption of the budget at auction services according to KPKNL's authority in the 2017 State Wealth Service and Auction Office in absorbing the budget in the 2017 Office of State Wealth Services and Auction in Palembang. payment, procedure dimensions of goods and services. This study uses Qualitative Methods, data sources are secondary data and primary data, data collection techniques through observation, interviews and documentation studies. The results of the study show that the factors that caused the low absorption of the budget in the Auction Service according to the KPKNL Authority in the State Assets Office and Palembang Auction in 2017 are the mismatches of plans with budget realization and limited human resources resulting in multiple positions in planning. Broadly speaking, the results of the study can be concluded that the factor of budget absorption in auction services according to KPKNL's authority in the state wealth service office and the Palembang auction in 2017 is classified as ineffective and consistency is needed in implementing the budget plan.

Keywords: *budget absorption, budget planning documents, payment procedures, goods and services procedures.*

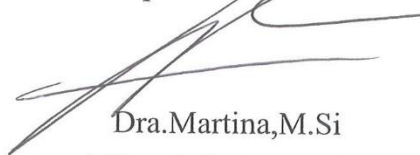
Super Advisor I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si

NIP.196511171990031004

Super Advisor II



Dra. Martina, M.Si

NIP.19660305199022001

Palembang, Desember 2018

Chairman of the State Administration Science Department

Faculty of Social and Political Science

Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, Msi

NIP.19810827009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

" Saat kita memperbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki segala sesuatunya untuk kita."

(Dr. Bilal Phillips)

**Atas Rahmat Allah
Subhanallahu Wa Ta'ala, Ku
Persembahkan Skripsi ini
Kepada :**

- 1. Kedua orang tua ayahku
tercinta Kgs.Agus Salim dan
ibuku terkasih Nyimas Dacik**
- 2. Saudara ku perempuan
Nyayu Nur Aisyah,dan Nyayu
Fadillah Yuliana**
- 3. Sahabat Tercinta , dan
Teman -teman seperjuangan
Admnistrasi Negara 2014**
- 4. Dosen Pembimbing Skripsi
Bapak Dr.Ardiyan
Saptawan,M.Si dan Ibu
Dra.Martina,M.Si**
- 5. Almamater Universitas
Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Pertama, Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah S.W.T karena berkat rahmat dan karunia-Nya kepada hambanya. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sehingga tugas penulis sebagai mahasiswa FISIP dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Program Layanan Lelang Sesuai Kewenangan Kpknl di Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Palembang (KPKNL) Tahun 2017”***. skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh derajat S-1 Ilmu Administrasi Negara. Selama mengerjakan proses skripsi ini, penulis banyak memperoleh Bimbingan, bantuan dan do’a dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yang telah memberikan Dukungan, Motivasi serta do’a nya selama mengikuti penelitian skripsi ini .
2. Nyayu Nur Aisyah Asmeilinda dan Nyayu Fadillah Yuliana , Saudara –saudara saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat, motivasi serta doa untuk menyelesaikan penelitian skripsi.
3. Bapak Prof. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Kiagus M Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Zailani Surya Marpaung , S.Sos, MPA , selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi negara Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku dosen pembimbing I saya yang telah membantu saya menyusun skripsi ini
8. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku dosen pembimbing II saya yang telah membantu saya menyusun skripsi ini
9. Bapak Dr. Raniasa Putra Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Dra. Martina, M.Si sebagai Sekretaris Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Tahun 2014-2018.
10. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah mengajar dan mendidik penulis.
11. Bapak Muhammad Syukur, selaku Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Palembang (KPKNL) dan Seluruh staf pegawai karyawan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Palembang (KPKNL) yang telah memberikan bantuan informasi data dan dukungannya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
12. Teman teman seperjuangan administrasi negara angkatan 2014 selaku rekan seperjuangan selama penelitian skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang telah terlibat dalam membantu kelancaran penelitian skripsi penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Palembang, Desember 2018

**Nyayu Mashito Agustri Dayanti
NIM. 07011381419176**

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
1. Ilmu Administrasi Negara Hubungan Dengan Keuangan Negara.....	10
2. Anggaran	11
3. Penyerapan Anggaran.....	17
4. Faktor – Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran	18
B. Penelitian Terdahulu	19
C. Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Definisi Konsep	21
C. Fokus Penelitian.....	22
D. Unit Analisis	23
E. <i>Informant</i>	23
F. Sumber Data	23
G. Teknik Pengumpulan Data	24
H. Teknik Analisis Data	24

I. Sistematika Penulisan.....	25
-------------------------------	----

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang.....	26
B. Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang.....	29
C. Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang.....	30
D. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang.....	31
E. Uraian Tugas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang.....	32
F. Pejabat terkait pengelolaan anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	36
G. Telaah Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang.....	40

BAB V ANALISIS DAN INTERPRESTASI DATA

A. Dimensi Dokumen Perencanaan Anggaran	43
1. Rencana kerja dan Anggaran satuan kerja kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang	45
2. Sumber Daya Manusia (SDM)	52
B. Dimensi Prosedur Pembayaran.....	54
1. Wujud Pelaksanaan Program/Layanan.....	54
2. Koordinasi Antar Unit Kerja.....	57
3. Terpakai nya Anggaran sesuai Rencana yaitu Jumlah Anggaran Program / Layanan Untuk Instansi Tersekap	58
C. Dimensi Prosedur Barang Dan Jasa.....	60
1. Penyusunan Jadwal Lelang.....	62
2. Adanya Penanggulangan Lelang.....	63

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....	66
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	68
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Buku Laporan Realisasi Anggaran pada Rincian Belanja untuk Periode Berakhir 31 Desember 2017.....	5
2. Target dan Persentase Pencapaian Program Layanan Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang (KPKNL) 2017	6
3. Kriteria Kinerja Keuangan (Efektifitas)	6
4. Penelitian Terdahulu	19
5. Fokus Penelitian	22
6. Laporan Rencana Kerja Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Tahun 2017	49
7. Kriteria Kinerja Keuangan (Efektifitas)	50
8. Jumlah Pegawai dibagian Lelang KPKNL.....	52
9. Rencana Kerja Anggaran dan Realisasi Anggaran program Layanan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.Kerangka Pemikiran	20
2.Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palembang	31
3. Dasar KPJM dalam RKA-KL.....	47
4. Pelaksanaan Lelang	56
5. Penetapan Jadwal Lelang	62

DAFTAR SINGKATAN

RKA	: Rencana Kerja dan Anggaran
DIPA	: Daftar Isian Penyusunan Anggaran
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RKPD	: Rencana Kerja Perangkat Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara bagi Pegawai KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang.....	68
2. Surat Penunjukan.....	71
3. Kartu bimbingan skripsi pembimbing I	72
4. Kartu bimbingan skripsi pembimbing II	74
5. Kartu Revisi seminar proposal	76
6. Kartu Revisi ujian komprehensif	80
7. Surat izin penelitian.....	83
8. Surat balasan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang....	84
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.249tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga	85
10. Laporan Realisasi Anggaran Belanja.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan *good governance and clean government* di bidang keuangan Negara pemerintah Indonesia melaksanakan reformasi dibidang pengelolaan keuangan Negara. Reformasi tersebut antara lain ditandai dengan diterbitkannya paket Undang Undang dibidang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan menteri keuangan rencana kerja dan anggaran kementerian negara / lembaga.

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/ APBD dalam UU No. 17 Tahun 2003 meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klarifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Sehubungan dengan itu, dalam UU No. 17 tahun 2003 ini disebutkan bahwa belanja Negara dan belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program kegiatan dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/ DPRD.

Salah satu faktor pendukung keberhasilan dari suatu organisasi dalam mencapai tujuan adalah adanya sumber dana. sumber dana yang dimaksud dalam organisasi merupakan anggaran.

Anggaran merupakan Alat perencanaan sekaligus alat pengendalian Pemerintahan. anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai pengendalian mengindikasikan alokasi sumber daya publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali kegiatan Pemerintah.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Pemerdagri) No.57 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi dua kelompok belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi oleh adanya program atau kegiatan.

Berdasarkan Belanja Daerah Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2007 sebagai Pengganti Peraturan dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dinyatakan bahwa Struktur APBD merupakan Satu Kesatuan yang terdiri dari 1.)Pendapatan Daerah, 2.)Belanja Daerah, 3.)Pembiayaan Daerah.

Belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan dengan daerah terutama pembangunan daerah. belanja langsung juga merupakan program atau rencana kerja yang akan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah selama satu tahun anggaran. belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal adalah belanja untuk melaksanakan program atau kegiatan

pemerintah daerah yang telah dianggarkan pada belanja setiap satuan kerja perangkat daerah tertentu. jumlah anggaran belanja langsung untuk suatu program atau kegiatan tersebut diukur dan dibandingkan dari program yang bersangkutan yang direncanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. Penyerapan anggaran merupakan masalah yang selalu terjadi terutama pada instansi pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena terlambatnya penyerapan atau sering sekali terjadi penumpukan pada akhir tahun, hal tersebut terbukti masih tersisanya sejumlah anggaran (silpa). Menurut menteri keuangan (dikutip dari antara news diakses tanggal 20 februari 2012) menjelaskan :

“salah satu penyebab utama penyerapan anggaran terlambat adalah karena unit perencanaan serta pelaksanaan dalam pengadaan barang dan jasa tidak berkoordinasi dengan baik karena rencana anggaran belanja tidak tersusun dengan rapi .”

Suatu instansi dapat dikatakan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik apabila dapat menyerap 100% anggaran pemerintah, meskipun hasil dari program tersebut masih jauh dari standar .tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintahan, dapat diukur baik pada *input* (masukan) dari program, ditekankan pada keluaran, proses, manfaat, dan dampak. Selama ini pelaksanaan anggaran baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kelemahan yang cukup memperhatikan. Hal tersebut dilihat dari penyerapan anggaran terutama anggaran sesuai dengan jumlah anggaran yang ditetapkan bukan berarti terjadinya penghematan tetapi tidak terlaksanakannya program kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Semua pembangunan menjadi terhambat dan tidak terjadinya kedisiplinan serta tidak konsisten terhadap jadwal yang dijalankan.

Penyerapan Anggaran yang dilakukan pemerintah jauh lebih besar pada akhir tahun anggaran daripada awal tahun anggaran. hal tersebut seperti dikatakan oleh Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian (Jakarta, rabu 15/12) yang mengatakan “Masalahnya penyerapan anggaran itu selalu lebih besar pada bagian akhir.” Penyerapan anggaran yang rendah sering kali penumpukan pada akhir tahun merupakan salah satu penyebab rendahnya kinerja yang dilakukan instansi dalam melaksanakan program. hal tersebut yang membuat kinerja organisasi tidak berhasil dalam mencapai tujuan kinerja karena penyerapan anggaran yang rendah sehingga menghambat semua kegiatan atau program kerja instansi tersebut.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah yang berada dibawah Unit Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengelola dana APBN yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai wujud pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang optimal. Rincian DIPA dan realisasi tersebut dan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Table 1.

TABLE 1.

BUKU LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA RINCIAN BELANJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN %
Belanja Pegawai	1,929,824,000	1,844,781,205	95.59%
Belanja Barang	3,580,895,000	2,794,010,190	78.03%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0.00%
Belanja Modal	65,000,000	64,713,000	99.56%
Jumlah	5,575,719,000	4,703,504,395	84.36%

Sumber Data: (Data Diambil Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palembang Tahun 2018).

Berdasarkan Tabel 1 paparan di atas, dapat kita lihat bahwa realisasi dari Anggaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang memiliki Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.5.575.719.000,00 sedangkan realisasi Anggaran Belanja Langsung hanya sebesar Rp. 4.703.504.395,00 atau sebesar 84.36% masih menyisahkan sisa anggaran yang cukup besar. Dana tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal, mengingat bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan mendekatkan penyusunan anggaran kepada pihak penggunanya. Pada belanja barang dan jasa realisasi anggaran hanya sebesar Rp.2.794.010.190,00 dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.3.580.895.000,00. itu menunjukkan bahwa rendahnya penyerapan yang dilakukan pada belanja barang dan jasa dalam program kegiatan tersebut dan menunjukkan masih menyisahkan sisa anggaran yang cukup besar.

Sehubungan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, yakni sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dibuatlah Program Kerja

untuk mencapai visi misi itu. Berikut Tabel Program Layanan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang Tahun 2017.

TABEL 2.
TARGET DAN PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM LAYANAN
DIKANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELENG PALEMBANG TAHUN 2017.

Kode	Program/layanan Output/sub output/aktivitas	Anggaran	Realisasi Anggaran	% realisasi anggaran
1716.001	Layanan pengelolaan kekayaan negara sesuai kewenangan kpkn	1.741.422.000	1.409.843.818	80.96%
1716.002	Layanan pengurusan piutang negara sesuai kewenangan kpkn	167.610.000	112.281.080	66.99%
1716.003	Layanan lelang sesuai kewenangan kpkn	305.200.000	209.469.299	68.63%
1716.951	Layanan internal (overhead)	65.000.000	64.713.000	99.56%
1716.994	Layanan perkantoran	3.296.487.000	2.936.945.048	89.09%

Sumber Data: (Data Diambil Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang Tahun 2018).

Berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut :

Tabel3

Kriteria Kinerja Keuangan (Efektifitas)

Persentasi kinerja keuangan	Kriteria
100 %	<i>Sangat Efektif</i>
90 % - 100 %	<i>Efektif</i>
80 % - 90 %	<i>Cukup Efektif</i>
60 % - 80%	<i>Kurang Efektif</i>
Di bawah dari 60%	<i>Tidak Efektif</i>

Sumber Data: (Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan)

Berdasarkan tabel diatas,bahwa program kegiatan/layanan ini terdapat layanan penyerapan anggarannya masih hanya 68.63% pada program layanan lelang sesuai kewenangan KPKNL dengan anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 305.200.000,00.- sedangkan realisasi anggaran Rp. 209.469.299,00.-.dan pada program layanan yang terserap pada anggaran yaitu sekitar 68.63% yang merupakan masih banyak sisa anggaran yang belum terserap 100 % maka dari itu saya perlu diteliti bahwa faktor faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran pada program layanan lelang sesuai kewenangan KPKNL.

Berdasarkan tabel 2. tentang Program Layanan Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang Palembang Tahun Anggaran 2017 menjelaskan bahwa Layanan Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang Palembang Tahun Anggaran 2017 memiliki lima program layanan kerja meliputi

1. Layanan pengelolaan kekayaan negara sesuai kewenangan kpknl
2. Layanan pengurusan piutang negara sesuai kewenangan kpknl
3. Layanan lelang sesuai kewenangan KPKNL
4. Layanan internal (*overhead*)
5. Layanan perkantoran

Jadi saya memilih pada layanan lelang sesuai kewenangan KPKNL karena 68.69 % itu masih belum efektif .

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang tersebut, maka perlu diteliti lebih dalam mengenai penyebab rendahnya kinerja rendahnya penyerapan anggaran pada program layanan lelang sesuai kewenangan KPKNL agar diketahui solusi penyelesaiannya.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu :

Faktor faktor penyebab terjadinya rendahnya penyerapan anggaran sehingga terjadinya selisih anggaran mengakibatkan sisa anggaran Satuan Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis Faktor-faktor penyebab terjadinya rendahnya penyerapan anggaran sehingga terjadinya selisih anggaran mengakibatkan sisa anggaran Satuan Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan wawasan dibidang Keuangan Negara khususnya mengenai faktor faktor penyebab anggaran lebih besar dari pada realisasi Anggaran dan proses anggaran berbasis kinerja di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, sebagai bahan pengembangan teoritis bagi ilmu pengetahuan pada ilmu administrasi negara khususnya konsentrasi keuangan administrasi negara.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai informasi sebagai tambahan referensi dalam menganalisis faktor penyebab rendahnya Penyerapan Dana Dalam Anggaran Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palembang Tahun 2017 penyerapan anggaran, terutama informasi mengenai hal-hal yang dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah penyebab terjadinya rendahnya penyerapan anggaran di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Jamaluddin, Ahmad. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Yogyakarta :Gava Media.
- Mardiasmo.2009.*Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo.2004.*Efisiensi dan Efektifitas*, Jakarta:Andi.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sugiyono.2012.*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R,D*. Bandung:Alpabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2016.*Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*.Bogor:Ghalia Indonesia.
- Suparmoko, M. 2011. *Keuangan Negara dalam teori dan praktik*. Yogyakarta: BPFE.
- Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia(SANRI)*. jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Thoha,Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana prenadamedia group.
- Uha,Ismail Nawawi.2014.*Manajemen Perubahan : Teori dan Aplikasi pada Organisasi Publik dan Bisnis*.Bogor: Ghalia Indonesia.
- Universitas Sriwijaya.2014.*Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*.Palembang:Universitas Sriwijaya.

Universitas Sriwijaya.2009.*Buku Ajar Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (Mpk)*

Bahasa Indonesia.Palembang:Universitas Sriwijaya.

Peraturan perundang undangan :

Peraturan Menteri Keuangan NO. 249/PMK.002/2011 tentang *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga*.

Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dokumen :

Laporan realisasi anggaran kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Palembang Tahun 2017.

Rencana kerja dan anggaran kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Palembang Tahun 2017.

Skripsi

Fitri, Sariyanti.2010.*Analisis Penyerapan Dana dalam Anggaran Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Tahun Anggaran 2009* .Palembang : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Administrasi Negara ,Univesitas Sriwijaya.

Internet

Hendris,Herriyanto.(2012).*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi KeterlambatanPenyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementrian/Lembaga di Wilayah Jakarta*. (Tesis). Jakarta : Universitas Indonesia (diakses melalui google pada <http://> 12 maret 2018)\

Setiawan,Adi.2016.*Analisis Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja kementerian/Lembaga Di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro Tahun Anggaran 2015* .(Tesis): Universitas Airlangga(Diakses Melalui Google [http :](http://)//15 Maret 2018).

Tasya Putri ,Carlin.2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah ProvinsiBengkulu*.(tesis)bengkulu : universitas bengkulu (diakses google <http://> 15 Maret 2018)